

Pengembangan

Infrastruktur Perkotaan

Syamsubaird Syarifuddin

Batara Surya

S. Kamran Aksa

Pengembangan

Infrastruktur Perkotaan

Copyright@penulis 2022

Penulis:

Syamsubaird Syarifuddin
Batara Surya
S. Kamran Aksa

Editor:

Aslam Jumain
Zulkifli Maulana

Tata Letak:

Mutmainnah

vi+ 70 halaman

15,5 x 23 cm

Cetakan: 2022

Dicetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN: 978-623-09-1372-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Chakti Pustaka Indonesia
Jl. Ir. Sutami Ruko Villa Mutiara Indah
Kelurahan Bulurokeng, Kec. Biringkanaya
Makassar - 90241



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan berkahnya, sehingga penyusunan buku ini dapat di selesaikan yang berjudul **“Pengembangan Infrastruktur Perkotaan”**. Melalui perhelatan waktu yang relatif panjang, akhirnya buku ini tiba pada suatu titik pendedikasiannya oleh sebuah tuntutan dari sebuah tuntutan dari sebuah implementasi akademik.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian buku ini.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan kami kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca semoga Tuhan yang maha pengasih memberikan rahmat kepada kita semua. Amin...

Makassar, September 2022

Penulis



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 INFRASTRUKTUR	7
A. Definisi Infrastruktur.....	7
B. Pengembangan Infrastruktur.....	9
C. Infrastruktur Jalan	12
BAB 3 PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH	
A. Pelayanan Ekonomi.....	19
B. Strategi Pengembangan Pelayanan Ekonomi.....	27
C. Manfaat Infrastuktur Perspektif Ekonomi	46
BAB 4 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	
DALAM PERKOTAAN BARRU.....	49
A. Karakteristik Wilayah Perkotaan Barru ...	49
B. Strategi Pengembangan Struktur Pelayanan Ekonomi Perkotaan.....	53
C. Pola dan Pemanfaatan Ruang Perkotaan Barru.....	62

BAB 5	PENUTUP	65
DAFTAR PUSTAKA		67



1 PENDAHULUAN

Pertumbuhan Kabupaten Barru selama lima tahun terakhir menurut data statistik terus mengalami peningkatan, namun seiring dengan peningkatannya, pada wilayah perkotaan Barru bermunculan berbagai permasalahan perkotaan. Menurut Asoka et al, 2013, Perkembangan kota yang meningkat tidak dapat dihindari. Pemecahan pada permasalahan perkotaan sangat bergantung pada perencanaan kota yang efisien mengenai pembangunan infrastruktur serta manajemen. Perencanaan tersebut hendaknya bisa mencermati pada permasalahan demografi, area, ekonomi, serta spasial sosial yang pengaruhi pengembangan dan kawasan pada warga perkotaan.

Zahnd (2006) menarangkan kalau kota ialah simbol dari kesejahteraan, peluang berusaha serta dominasi terhadap daerah sekitarnya, akan tetapi kota pula merupakan sumber polusi, kemiskinan dan perjuangan untuk sukses. Berikutnya kota selaku sesuatu Sistem merupakan sekelompok kota- kota yang saling bergantung satu sama lain secara fungsional dalam sesuatu daerah serta mempengaruhi terhadap daerah sekitarnya. Sistem kota berisi tentang distribusi kota, indeks serta keutamaan kota dan peranan kota (Muta'ali, Lutfi, 2015). Perkembangan sesuatu kota bisa diisyarati dengan

meningkatnya jumlah penduduk secara terus menerus yang menyebabkan meningkatnya kegiatan sosial serta ekonomi pada kota tersebut (Sari, Rudiarto, 2018)

Kabupaten Barru merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang terdiri dari 7 kecamatan 40 Desa dan 15 Kelurahan, dengan Jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 182.373 Jiwa. Secara Geografis Kabupaten Barru terletak di 4°5'49" - 4°47'35" LS dan 119°35'00" - 119°49'16" BT atau di pesisir barat Provinsi Sulawesi Selatan.

Kawasan Perkotaan Kota Barru berada di Kecamatan Barru sebagai pusat perkotaan Kabupaten Barru terdiri dari kelurahan Sumpang Binangae, Kelurahan Tuwung, Kelurahan Coppo dan Kelurahan Mangempang dengan luas wilayah Perkotaan kota Barru kurang lebih 4.930,85 hektar. Jumlah penduduk tahun 2019 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 43.277 Jiwa.

Dalam wilayah kawasan perkotaan Barru didominasi oleh kegiatan non agraris yang berdasarkan jenis pekerjaannya terdiri dari Pegawai Pemerintah, Karyawan Swasta, BUMN dan wiraswasta dengan tatanan buatan terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, fasilitas kesehatan serta prasarana wilayah perkotaan lainnya. (Bappeda Kab. Barru, 2019).

Berdasarkan data Dinas PUPR Kabupaten Barru, infrastruktur jaringan jalan di perkotaan Barru memiliki panjang 28,5 kilometer yang diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat perkotaan Barru. Pengembangan infrastruktur, utamanya infrastruktur

jaringan jalan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Barru, diantaranya peningkatan dan konektivitas jalan yang ada di Perkotaan Kota Barru, namun yang menjadi perhatian adalah seiring dengan peningkatan akses infrastruktur khususnya jaringan jalan, pelayanan ekonomi di perkotaan Barru seharusnya dapat tumbuh beriringan. Dari data sektor-sektor usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Koperindag & UMKM Kabupaten Barru memperlihatkan trend sektor usaha dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung menurun.

Hal ini menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten, bagaimana layanan ekonomi dapat tumbuh dengan baik di Perkotaan Barru seiring dengan peningkatan infrastruktur. Menurut Silvia Sukirman (1994) Jalan merupakan jalur- jalur yang di atas permukaan bumi yang dengan terencana dibuat oleh manusia dengan bermacam wujud, ukuran- ukuran serta konstruksinya guna bisa digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan serta kendaraan yang mengangkut beberapa barang dari tempat yang satu ke tempat yang yang lain dengan cepat serta gampang. Selanjutnya, Alamsyah (2001) Sistem jaringan jalan diklasifikasikan menjadi sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder, dan fungsi jalan diklasifikasikan menjadi jaringan arteri primer, jalan pengumpulan primer, jalan lokal primer, jalan arteri sekunder, dan wilayah sekunder. jalan.

Berdasarkan data jumlah unit usaha menurut nilai investasi per sektor Tahun 2015-2017, Jenis usaha menunjukkan angka yang tidak stabil dan cenderung mengalami penurunan.

Tabel.1.1 Data Jumlah Unit Usaha Perkotaan Barru Tahun 2016-2019

No	Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019
1.	Sektor Primer				
	Perikanan		8	5	6
2.	Sektor Sekunder				
	Industri	14	3	12	18
	Makanan				
	Industri Kayu	8	7	11	15
	Percetakan	2		4	5
3.	Sektor Tersier				
	Perdagangan dan Reparasi	231	123	76	88
	Hotel dan Restoran	7	7	4	5

Sumber: Data SIPD Bappeda Kab. Barru Tahun 2020

Teori infrastruktur Menurut Grigg (1998), Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, irigasi, drainase, bangunan, dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik sosial maupun ekonomi. kemudian dihubungkan dengan teori Poros yang dikemukakan oleh Babcock (1960), Babcock berfokus pada peran transportasi dalam mempengaruhi struktur spasial kota.

Fungsi dan mobilitas penduduk memiliki intensitas yang sama, dan medan perkotaan diasumsikan seragam..

Faktor utama yang mempengaruhi mobilitas adalah jalan yang menghubungkan kawasan pusat bisnis dengan daerah luar. Aksesibilitas memperhitungkan biaya waktu dari sistem transportasi yang ada. Ada lebih banyak pembangunan di sepanjang sumbu lalu lintas daripada di zona tengah. Selanjutnya dalam teori lokasi Walter Christaller (1933) menjelaskan bahwa Pusat layanan biasanya didistribusikan di dalam wilayah menurut pola heksagonal (heksagonal).

Situasi ini ditemukan di daerah di mana ada dua kondisi: medan dan kehidupan ekonomi yang seragam, dan analisis lokasi mencakup elemen jarak, Berinteraksi dan menekankan gerakan (movement.). Menurut White dan Grey (1996), ada empat kategori pusat perbelanjaan ditinjau dari skala pelayanannya, yaitu lingkungan, komunitas, regional, dan super regional. Menurut Rondinelli dan Riddle, 1978:64-67,175-180), Hirarki pelayanan dinegara berkembang dibagi menjadi empat tingkatan yakni pusat desa, kota kecil/kota pasar, kota menengah pusat wilayah regional (regional centre) dan kota utama (primary city).

Beberapa penelitian telah dilakukan sejauh ini. MG. Endang Sri Utari (2014) mengevaluasi sarana dan prasarana di ruang kerjanya. Mega Lestari, Suhadak (2019), fokus mengkaji kebijakan penataan ruang pada pertumbuhan perkotaan, sekaligus mendukung layanan ekonomi dalam melakukan kegiatan usaha, infrastruktur dari rata-rata peningkatan ekonomi PDB nasional Kami menganggapnya sebagai penentu pertumbuhan. Dewi Siska (2019) melakukan survei peningkatan pelayanan ekonomi dari segi fasilitas wilayah.

Melihat kondisi yang terjadi terkait infrastruktur jalan dan pelayanan ekonomi perkotaan Barru, terdapat gap antara kenyataan di perkotaan Barru dengan teori-teori yang dikemukakan para ahli, sementara peneliti terdahulu belum melihat secara spesifik dari klasifikasi jenis infrastruktur terhadap pelayanan perkotaan seperti klasifikasi infrastruktur jaringan jalan menjadi salah satu determinan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat khususnya di perkotaan Barru.

Hal ini yang menjadi fokus peneliti dalam melihat apakah perkembangan infrastruktur jalan di Kabupaten Barru menjadi salah satu faktor determinan terhadap pelayanan ekonomi perkotaan Barru, disamping itu peneliti akan melihat strategi yang perlu dilakukan dalam pengembangan pelayanan ekonomi perkotaan khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), karena menurut Mc. Commick et.al,1997; Zang, 2001; Laceiva, 2004; Haris Maupa, 2004; dan DinasKop dan UKM Sulsel, 2006).

Kinerja sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Faktor internal meliputi aspek SDM (pemilik, manajer, dan karyawan); aspek keuangan, aspek teknis produksi; dan aspek pemasaran. Sedangkan Faktor eksternal terdiri dari kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, serta peranan lembaga terkait seperti Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta, dan LSM.



2 INFRASTRUKTUR

A. Definisi Infrastruktur

Infrastruktur adalah fasilitas yang memungkinkan kegiatan ekonomi dan pasar sebagai berikut: Transportasi, telekomunikasi, jaringan distribusi, utilitas, air, saluran air, sistem pasokan energi. (Todaro, 2011:82). Stone dalam Prasetyo (2009:225) mendefinisikan “infrastruktur sebagai Fasilitas fisik yang diperlukan oleh otoritas publik untuk fungsi pemerintah dalam penyediaan air, listrik, pengelolaan limbah, dan transportasi untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial”. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. “Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, dan perlengkapan yang dibangun dan diperlukan untuk berfungsinya sistem sosial dan ekonomi masyarakat.” (Grigg dalam Prasetyo, 2009:225).

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek kunci dan penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Kecepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di suatu negara atau wilayah tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi. Oleh karena itu, perluasan infrastruktur merupakan dasar dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perluasan infrastruktur dan perbaikan pemerintahannya harus mendorong pertumbuhan ekonomi (suratno, 2010).

Fox (2004), mendefinisikan infrastruktur sebagai, *“These services derive from a range of public works that have traditionally been supported by the public sector to improve private sector production and enable household consumption.”*. Moteff (2003), mendefinisikan infrastruktur tidak hanya terbatas pada sudut pandang ekonomi tapi juga pemerintah dapat mempertahankan dan secara berkelanjutan.

Selanjutnya Vaughn and Pollard (2003), Infrastruktur biasanya mencakup jalan, jembatan, sistem air dan saluran pembuangan, bandara, pelabuhan, bangunan umum, termasuk sekolah, fasilitas medis, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, pemadam kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan telekomunikasi.

Infrastruktur itu sendiri di dalam sistem mendukung sistem sosial dan ekonomi dan merupakan penghubung ke sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur berdampak pada sosial dan sistem ekonomi masyarakat yang ada. Oleh

karena itu, infrastruktur harus dipahami sebagai dasar pengambilan kebijakan. (kodotie,2005).

B. Pengembangan Infrastruktur

Prasarana adalah kebutuhan fisik dasar yang diperlukan seperti jalan, rel kereta api, jembatan, listrik, telekomunikasi, irigasi/irigasi, bandar udara, dll, yang bertujuan untuk menyelenggarakan sistem struktural yang diperlukan untuk menjalankan perekonomian. "Ketersediaan infrastruktur fisik yang tepat mendukung kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat dan distribusi arus produksi barang dan jasa." (Susantono, 2012:194).

Fungsi dari pembangunan infrastruktur adalah untuk kelancaran arus barang dan jasa, infrastruktur transportasi akan memberikan dampak yang besar untuk biaya pokok produksi. Infrastruktur merupakan peningkatan aksesibilitas yang mampu untuk memfasilitasi mobilitas barang dan jasa yang lebih efisien.

Beberapa fakta empiris menunjukkan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur di suatu wilayah berjalan berdampingan dengan perkembangan sektor ekonomi wilayah tersebut (Calderon & Serven, 2004; Demurger, 2001; Maryaningsih, Hermansyah & Savitri 2014). Hal ini Lantaran perkembangan ekonomi sudah menuntut ketersediaan wahana & prasarana infrastruktur yg memadai.

Keberadaan infrastruktur mendorong peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi. Perbaikan infrastruktur menaikkan investasi & pertumbuhan ekonomi, lantaran investasi akan menaikkan energi kerja. Menurut siregar &

Sukwika (2007), investasi memainkan peranan krusial pada memilih penyerapan energi kerja. Infastruktur yang baik akan merangsang peningkatan pendapatan masyarakat, lantaran aktifitas ekonomi yg semakin semakin tinggi menjadi dampak gerak faktor produksi & aktifitas perdagangan yang semakin tinggi.

Dengan demikian, perkembangan infrastruktur menggunakan pembangunan ekonomi mempunyai interaksi yang sangat erat & saling tergantung satu sama lain. Ketimpangan pembangunan infrastruktur yg terjadi jua akan berperan terhadap kesenjangan pembangunan ekonomi yang berujung dalam ketimpangan kesejahteraan antar wilayah (Demurger, 2001; fan & Chan-Kang, 2008; Surd, Kassai, & Giurgiu, 2011; Warr, Menon & Resphone, 2015).

The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi termasuk penegakan hukum, manajemen administrasi dan koordinasi.

Menurut Grigg (1988), Enam kategori besar infrastruktur adalah:

1. Kelompok Jalan (Jalan, Jalan raya, jembatan);
2. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara);
3. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua system air, termasuk jalan air);
4. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat);
5. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar;
6. Kelompok produksi dan distribusi energy (listrik dan gas).

Selain itu menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2015 jenis-jenis infrastruktur adalah:

1. Infrastruktur transportasi;
2. Infrastruktur jalan;
3. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
4. Infrastruktur air minum;
5. Infrastruktur system air limbah terpusat;
6. Infrastruktur system pengelolaa air limbah setempat;
7. Infrastrukur system pengelolaan persampahan;
8. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
9. Infrastruktur ketenagalistrikan;
10. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energy terbarukan;
11. Infrastruktur konservasi energy;
12. Infrastruktur fasilitas perkotaan;
13. Infrastruktur fasilitas pendidikan;

14. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian;
15. Infrastruktur kawasan;
16. Infrastruktur pariwisata;
17. Infrastruktur kesehatan;
18. Infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
19. Infrastruktur perumahan rakyat.

Secara sederhana, menurut Ian Jacobs (1999), ia membagi berbagai jenis infrastruktur yang dikenal sebagai infrastruktur dasar dan pelengkap. Kasus ini secara teknis belum terpisah secara spasial. Contoh infrastruktur dasar adalah jalan, bendungan, rel kereta api, saluran air dan kanal. Pentingnya infrastruktur pelengkap (complementary infrastructure) seperti telepon, gas, air minum dan listrik.

C. Infrastruktur Jalan

Silvia Sukirman (1994) Jalan adalah jalur permukaan yang sengaja digunakan oleh orang dalam berbagai bentuk, ukuran, dan struktur. Lalu lintas orang, hewan dan kendaraan pengangkut dari satu lokasi ke lokasi lain dengan cepat, mudah. Menurut Alamsyah (2001), system jaringan jalan diklasifikasikan menjadi sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder, dan fungsi jalan adalah jaringan arteri primer, jalan koleksi primer, jalan lokal primer, jalan arteri sekunder, sekunder. Wilayah jalan.

➤ Bentuk Jalan

Menurut Larry S. Bourne: *Internal Structure of City*, 1982, bentuk kota adalah bentuk cincin radial, bentuk linier, bentuk persegi panjang, bentuk persegi,

bentuk satelit, dan bentuk kenyamanan. Jalan yang mengikuti bentuk kota linier adalah rencana kota untuk pembentukan kota yang memanjang. Kota ini terdiri dari sejumlah sektor paralel yang terspesialisasi secara fungsional. Secara umum, kota-kota berjalan sejajar dengan sungai dan dibangun sedemikian rupa sehingga angin bertiup dari daerah pemukiman ke daerah industri. Kota persegi menunjukkan potensi kota untuk berkembang ke segala arah. Ini "relatif" seimbang dan keterbatasan fisik "relatif" kurang penting. Namun di sisi lain, ada cara untuk mempercepat pertumbuhan kota menuju jalur tersebut (Nelson, 1908).

➤ Ukuran Jalan

Kendaraan desain adalah kendaraan yang mewakili kelompok yang digunakan untuk merancang bagian-bagian jalan. Pengaruhnya terhadap perencanaan kendaraan dan desain geometrik lebar lajur mempengaruhi lebar lajur yang dibutuhkan. Luas jalan yang tersedia (Damaja) dibatasi oleh lebar antara standar keselamatan pembangunan jalan di kedua sisi jalan, ketinggian 5 meter di atas permukaan jalan sumbu jalan, dan kedalaman ruang bebas di bawah 1,5 meter. Permukaan jalan. Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) adalah daerah sepanjang jalan di luar Damaja yang dipisahkan oleh tinggi dan lebar tertentu yang diukur dari sumbu jalan. Yakni jalan arteri minimal 20 meter, jalan pengumpulan minimal 15 meter, dan jalan lokal terkecil. 10 meter. (Silvia Sukirman, 1994)

➤ **Konstruksi Jalan**

mengklasifikasikan jalan berdasarkan bahan penyusun konstruksi jalan: jalan tidak beraspal, jalan kerikil, jalan muram, jalan kanker, dan kerikil apung, jalan aspal dan jalan beton.

a. **Jalan Tanah**

Jalan ini lebih murah daripada semua jenis jalan lainnya. Jenis jalan ini dicadangkan untuk daerah dan daerah dengan lalu lintas rendah. Sistem drainase yang baik diperlukan, yang mencerminkan kinerja yang baik dalam jangka panjang

b. **Jalan Kerikil**

Jalan kerikil juga merupakan jalan berkualitas buruk, tetapi lebih baik daripada jalan tanah. Campuran kerikil dan tanah yang dipadatkan digunakan untuk perkerasan jalan ini

c. **Jalan Murrum**

adalah zat yang diperoleh dari penguraian batuan beku oleh zat pelapukan. Digunakan untuk membuat jalan yang disebut *Murrum Road*.

d. **Jalan Kanker**

Jalan kanker tidak lain adalah batu kapur yang tidak murni. Ada *Canker Street* yang kaya akan kapur. Ini juga berkualitas rendah dan memiliki kinerja yang mirip dengan jalan kerikil dan muram.

e. **Jalan WBM (Water Bound Macadam)**

Jalan Water Bound Macadam (WBM) mengandung agregat batu yang dihancurkan di landasannya. Agregat ditebarkan di permukaan, disemprot dengan

air dan kemudian digulung. Jalan WBM berkinerja lebih baik daripada jalan kerikil, kerikil, muram, dan kanker. Jalan WBM berlapis dengan ketebalan masing-masing 10 cm. Bahan ini sangat abrasif dan dapat dengan cepat hancur di bawah lalu lintas

f. Jalan Aspal

Jalan aspal adalah jalan yang sangat populer di seluruh dunia. Ini adalah jalan tersibuk di dunia. Jalan ini sangat murah dan cocok untuk kondisi berkendara. Bahannya lentur dan tebal jalan aspal tergantung kondisi tanah.

g. Jalan Beton

Beton semen digunakan untuk membangun trotoar ketika trotoar beton dipasang. Jalan ini sangat populer dan lebih mahal daripada semua jenis jalan lainnya. Bahannya tidak fleksibel dan membutuhkan lebih sedikit perawatan. Jalan beton cocok untuk daerah dengan lalu lintas padat. Jalan beton memiliki sambungan dan masa konstruksinya lama. Jalan beton digunakan untuk membangun jalan raya.

➤ Fungsi Jalan

Menurut Alamsyah (2001) mengatakan berdasarkan, fungsi jalan dapat di klasifikasikan menurut:

- a. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan kota tingkat pertama dengan kota tingkat kedua. Kriteria berikut berlaku untuk jalan perkotaan utama:
1. Jalan utama dalam kota adalah jalan utama di luar kota.
 2. Mencapai area utama atau melalui arteri utama.

3. Arteri penghubung utama dirancang berdasarkan kecepatan desain minimum 60 km/jam.
 4. Lebar jalan lebih dari 8 meter.
 5. Kendaraan angkutan besar dan bus umum dapat menggunakan jalan ini
- b. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan kota tingkat dua dengan kota tingkat dua, atau jalan yang menghubungkan kota tingkat dua dengan kota tingkat ketiga. Kriteria berikut berlaku untuk daerah perkotaan:
1. Jalan utama kota adalah jalan utama di luar kota.
 2. Melalui area primer atau arteri, atau ke area primer atau arteri.
 3. Dirancang untuk kecepatan desain 40 km / jam
 4. Lebar jalan lebih dari 7 meter.
 5. Kendaraan angkutan besar dan bus diperbolehkan di jalan ini.
- c. Jalan lokal utama adalah jalan yang menghubungkan kota dan persil tingkat pertama, atau kota dan persil tingkat dua, atau kota tingkat ketiga dan kota tingkat ketiga, dan kota tingkat ketiga dan kota-kota yang lebih rendah.
1. Ini adalah jalan lokal utama di luar kota.
 2. Melalui atau ke area utama atau jalan utama lainnya.
 3. Dirancang untuk kecepatan desain 20 km / jam.
 4. Truk dan bus dapat melewati jalan ini.
 5. Lebar jalan lebih dari 6 meter.

- d. Jalan Lokal Sekunder, menghubungkan antara jalan lokal sekunder, daerah sekunder tersier dan di bawahnya dan daerah pemukiman sekunder. Standar perkotaan adalah sebagai berikut:
1. Didesain berdasarkan kecepatan desain maksimum 10km/jam.
 2. Lebar jalan lebih dari 5 meter.
 3. Di kawasan pemukiman, truk dan bus tidak boleh melewati fungsi jalan ini.
- Distribusi angkutan barang dan manusia

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi ke tangan konsumen (Oentari: 2010). Saluran Distribusi Menurut Suharno dan Sutarso (2010:2014), saluran distribusi adalah seperangkat pihak yang saling bergantung yang terlibat dalam distribusi suatu produk atau layanan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Saluran distribusi terdiri dari:

1. Bentuk distribusi, yaitu pendistribusian produk sampai ke tangan konsumen,
2. Cakupan, ini adalah area cakupan yang dicapai dengan cara produk dikirimkan ke konsumen.
3. Seleksi (evaluasi): Pilihan saluran distribusi tergantung pada bagaimana produk mencapai konsumen lebih cepat.
4. Lokasi (*location*), faktor ini terutama ditentukan oleh tempat tinggal konsumen, dimana produk yang akan dijangkau, dan dimana produk tersebut disimpan.

5. Transportasi cepat atau lambat tidak hanya menjangkau konsumen, tetapi juga melayani konsumen itu sendiri, sehingga perlu dikelola dengan lebih baik.



3 PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH

A. Pelayanan Ekonomi

Haksever dkk. (2000) Jasa didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan waktu, tempat, bentuk dan penggunaan psikologis. Menurut Edvardsson et al (2005), layanan atau layanan juga merupakan aktivitas, proses, interaksi, dan perubahan keadaan seseorang atau sesuatu yang dimiliki oleh pelanggan

Menurut P.A Samuelson (Putong, 2013:3), Ekonomi adalah bagaimana orang dan komunitas membuat keputusan, tidak menghabiskan uang, atau terbatas, tetapi Sebuah studi tentang bagaimana menggunakan yang tersedia sumber daya. Cara yang berbeda untuk memproduksi berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya kepada orang dan kelompok sosial yang berbeda untuk konsumsi saat ini dan masa depan. Menurut Mankiw (Putong, 2013:4), ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menghadapi sumber daya yang selalu terbatas atau langka. Menurut McConnell dan Brue (2005:3) definisi dari ekonomi adalah *It is the social science concerned with the efficient use of scarce resources to achieve the maximum satisfaction of economic wants.*

➤ Skala Pelayanan

Menurut White dan Gray (1996), dalam hal skala pelayanan, pusat perbelanjaan memiliki empat kategori: lingkungan, komunitas, wilayah, dan regional.

➤ Hirarki Pelayanan

Hirarki pelayanan menurut Rondinelli dan Ruddle, di negara sedang berkembang dapat dibagi menjadi empat tingkatan pelayanan, yaitu (Rondinelli dan Ruddle, 1978:64- 67, 175-180):

a. Pusat Desa (Village Service Center)

Ini adalah desa dengan standar yang berbeda. Pertama, kami menyediakan berbagai fasilitas dan layanan dasar yang dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk pedesaan. Kedua, menyediakan peralatan yang diperlukan untuk merangsang kegiatan non-pertanian, yaitu kegiatan industri kecil (industri rumahan) dan meningkatkan produktivitas pertanian. Ketiga, merupakan pusat yang memberikan pelayanan dasar, berbagai kebutuhan rumah tangga dan kegiatan pertanian ke desa-desa terpencil dan daerah pertanian terpencil. Keempat, kita memiliki organisasi masyarakat yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kelima, karena adanya hub (fisik, ekonomi dan sosial) yang menghubungkan kawasan pedesaan dengan kota-kota kecil dan pusat-pusat kawasan.

b. Kota Kecil/Kota Pasar (Market Town: Small City)

Fungsi utama kota adalah untuk pemasaran, terutama produk pedesaan, yang berfungsi sebagai penghubung

antara kota dan kehidupan pedesaan. Hal ini dapat dicapai melalui hadirnya berbagai fasilitas dan lembaga untuk pengumpulan dan pendistribusian barang dan jasa ke kota-kota besar.

c. Kota Menengah Pusat Wilayah Regional (Regional Centre)

Pusat wilayah ini berperan penting dalam proses transformasi dan pengembangan ekonomi dan tata ruang wilayah. Karena keragaman besar kehidupan sosial dan ekonomi di kota-kota menengah, ada interaksi antara gaya hidup modern (perkotaan) dan tradisional (pedesaan). Kota juga menerima pendatang dari desa dan berperan dalam menciptakan mekanisme bagi penduduk desa untuk beradaptasi dengan struktur ekonomi kota. Kota ini merupakan perpaduan antara daerah yang berciri desa dan daerah yang berciri perkotaan dalam hal ciri arsitekturalnya

d. Kota Utama (Primary City)

Kota berfungsi sebagai pusat utama, dengan tingkat pelayanan tertinggi melayani semua kegiatan dan berada pada posisi yang sangat dominan. Kegiatan di ibukota adalah perdagangan, jasa, administrasi pemerintahan, pendidikan, industri dan perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi berubah menjadi kegiatan tersier.

John Stuart Mill (1806–1873) di bidang Ekonomi adalah bidang ilmu praktis atau praktis yang berkaitan dengan penagihan dan pengeluaran. Juga tentang kegiatan produksi dan distribusi kekayaan.

Menurut Kamus Ekonomi, kegiatan ekonomi melibatkan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa di semua lapisan masyarakat.

➤ Faktor Produksi

Menurut Dr. Mohammad Hatta (1994:4), produksi adalah semua pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan, meningkatkan keuntungan yang ada, dan membagikan keuntungan tersebut kepada banyak orang. Dr Eko Harsono (1994:4) menyatakan bahwa produksi adalah segala usaha/kegiatan manusia yang dapat menjadikan suatu benda siap pakai untuk lebih memenuhi kebutuhan manusia. Assauri (1995) Produksi adalah kegiatan yang menciptakan atau meningkatkan penggunaan barang dan jasa. Magfuri (1987:72) Produksi adalah proses mengubah suatu produk agar memiliki nilai guna bagi kebutuhan manusia. Di sisi lain, menurut Heizer dan Render (2005), produksi adalah proses menciptakan barang dan jasa.

Zisca Veybe Sumolang, Tri Oldy Rotinsulu dan Daisy S.M. Engka (2017) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sebagai berikut:

a. Modal Kerja

Semua perusahaan perlu menyediakan modal kerja untuk mendanai operasi mereka sehari-hari. Membayar di muka pembelian bahan baku atau barang dan membayar upah dan gaji karyawan serta biaya-biaya lainnya. Banyak dari dana yang digunakan untuk mendanai bisnis kami diharapkan akan dikembalikan kepada kami dalam jangka pendek melalui penjualan barang atau produk

mereka. Uang yang diperoleh dari penjualan barang digunakan kembali untuk mendanai operasi perusahaan. Bilas (2008:23) menyatakan bahwa modal kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jalannya usaha, sehingga modal kerja selalu tersedia dan terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha.

b. Bahan Baku

Menurut Mulyadi (2005; 275), bahan mentah adalah "bahan mentah yang menyusun keseluruhan". Menurut Masiyal Kholmi (2003; 29), "Bahan baku merupakan mayoritas dari produk akhir, dan bahan mentah yang diproses oleh produsen tersedia sebagai hasil dari pembelian lokal, impor, atau pemrosesan milik sendiri". Bahan, di sisi lain, adalah "bahan utama dari suatu produk atau komoditas," menurut Suyadi Prawirosentono (2001; 61).

c. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan sinonim dari istilah personel, termasuk pekerja. Pekerja yang dimaksud adalah pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan perseorangan dan menerima tunjangan kerja harian atau penuh waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan tunjangan kerja biasanya diberikan setiap hari (Siswanto, 1989: 9). Selain itu, menurut BPS, pengertian kerja merupakan salah satu moda pergerakan roda dalam pembangunan. Jumlah dan komposisi angkatan kerja terus berubah karena statistik vital.

d. Pasar

Secara umum, pasar adalah tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembelian) dan penawaran (penjualan) suatu komoditas atau jasa tertentu, yang pada akhirnya menentukan harga penyelesaian (harga pasar) dan volume transaksi (Suprayitno, 2008)..

➤ Faktor distribusi

Menurut David A. Revza (Swasta dan Irawan, 2008:285), saluran distribusi adalah aliran barang dari produsen ke perantara dan akhirnya ke konsumen. Saluran distribusi merupakan mediator yang ikut serta dalam proses pemindahan barang dari produsen ke konsumen. (Mursid, 2001:85). Menurut Sigit (dalam Danang, 2015: 180), saluran distribusi adalah perantara, pembeli dan penjual, dan barang berpindah dari produsen ke konsumen, baik secara fisik maupun melalui perpindahan kepemilikan.

Faktor-faktor ini meliputi (1) pertimbangan pasar, (2) pertimbangan komoditas, (3) pertimbangan perusahaan, dan (4) pertimbangan perantara. (Basu Swastha, 2008: 299).

a. Pertimbangan pasar

Karena saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh perilaku pembelian konsumen, kondisi pasar merupakan faktor penentu dalam memilih saluran distribusi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah:

- Pasar konsumen atau industri
- Jumlah pembeli potensial

- Konsentrasi pasar secara geografis
 - Jumlah pesanan
 - Kebiasaan membeli
- b. Pertimbangan barang
- Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dari segi barang antara lain:
- Nilai yang sesuai
 - Ukuran dan berat produk
 - Produk rusak ringan
 - Produk standar
- c. Pertimbangan bisnis
- Dari perspektif bisnis, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih saluran distribusi:
- Sumber pengeluaran
 - Pengalaman dan keterampilan manajemen
 - Pemantauan saluran
 - Layanan penjual
- d. Pertimbangan perantara
- Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dari segi perantara diantaranya adalah:
- Layanan perantara
 - Penggunaan perantara
 - Sikap perantara terhadap kebijakan produsen
 - Volume penjualan
 - Biaya
- Faktor Konsumsi
- Menurut Keynes (1936) dari Firdayetti (2011), ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi:

- a. Pendapatan
Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin besar kemampuan rumah tangga untuk membeli kebutuhan konsumsi yang berbeda, sehingga semakin tinggi (tinggi) pendapatan, semakin tinggi tingkat konsumsi.
- b. Kekayaan
Jika seseorang mewarisi sebagai hasil dari upaya sebelumnya, orang itu dapat mengatur untuk mendapatkan kekayaan yang cukup. Dalam situasi ini, dia lebih tertarik menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi saat ini.
- c. Suku bunga
Ketika suku bunga rendah, orang enggan menabung karena mereka membelanjakan lebih baik dari pada menabung.
- d. Status Perekonomian
Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat pengangguran rendah dan orang cenderung membelanjakan uang lebih agresif.
- e. Distribusi pendapatan
Dalam masyarakat di mana pendapatan didistribusikan secara merata, mereka lebih mungkin untuk mengkonsumsi karena sebagian besar pendapatan nasional menguntungkan seluruh penduduk secara merata.
- f. Ketersediaan dana pensiun
Di beberapa negara, pasokan dana pensiun sangat tinggi, dan pendapatan dari dana pensiun yang sangat besar merangsang tingkat konsumsi.

B. Strategi Pengembangan Pelayanan Ekonomi

Strategi adalah semua kerangka kerja penting seperti kewirausahaan, daya saing, fungsionalitas, dll. Dan diterapkan untuk mencapai tujuan, bisnis dan keberhasilan, keberlanjutan. Nedelea & L.A., 2009). Menurut (Yasar, 2010), strategi dapat diartikan sebagai arah perusahaan yang membawa manfaat jangka panjang bagi perusahaan melalui pengelolaan sumber daya.

Pengembangan usaha mikro (UMK) di Indonesia merupakan salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional. Usaha ini merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan dan tidak hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan, pengentasan kemiskinan dan masalah ketenagakerjaan antara kelompok pendapatan dan agen. Selain itu, perkembangannya dapat memberikan kontribusi yang besar dalam memperluas basis ekonomi dan mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatkan ketahanan ekonomi regional dan nasional, Musran Munizu (2010).

Demirbag dkk. , (2006). Keberhasilan usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi baik negara maju maupun negara berkembang.

McCommick et.al, 1997; Zan, 2001; Laceiva, 2004; Haris Maupa, 2004; dan South Koperasi Sulawesi dan Departemen Usaha Kecil, 2006). Kinerja sektor usaha kecil menengah (UMK) dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu eksternal dan internal. Faktor internal meliputi aspek sumber daya manusia (pemilik, manajer, dan karyawan). Aspek keuangan

dan teknis produksi, dan aspek pemasaran. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, serta peran pemerintah, perguruan tinggi, pihak swasta, dan instansi terkait dan LSM.

Musran Munizu (2010) memisahkan faktor internal dan eksternal kinerja usaha kecil dan menengah (UMK) berdasarkan variabel dan indikator yakni;

a. Aspek sumberdaya manusia

- Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan karyawan dapat mempengaruhi daya saing perusahaan dan meningkatkan produktivitasnya (Yuniarti dan Suprianto, 2014). Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan pelaku UMKM diharapkan semakin mudah pula pelaku UMKM memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Marpaung2016). Tingkat pendidikan pengusaha juga memiliki hubungan positif dengan kredit. Semakin tinggi tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan komunitas, semakin besar kemungkinan Anda memiliki akses ke layanan perbankan.

- Jiwa kepemimpinan

Stogdill (1974) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah formasi pertama dari struktur pemeliharaan dalam harapan dan interaksi, sedangkan Katz dan Kahn (1978) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh secara bertahap dan rutin. Di luar kepatuhan mekanis terhadap arah organisasi, pemahaman adalah masih pada kegiatan sehari-hari organisasi dan tidak mengarah pencapaian tujuan yang akan dicapai

Menurut Timpe (1987), kepemimpinan pada dasarnya berarti berada di atas. Gunakan keterampilan fisik, gerakan positif, dan komunikasi Anda untuk membimbing orang lain ke jalan mana yang harus diambil. Berikutnya adalah pendapat Rauch dan Behling (1984) dan Jacob & Jacque (1990), yang menemukan bahwa pemimpin diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini didukung oleh pendapat Hoskin (1988) dan Flamholtz (1990), yang berbicara tentang kepemimpinan. Dengan kata lain, dapat dibagi menjadi kepemimpinan strategis dan kepemimpinan operasional. Kepemimpinan strategis adalah proses mempengaruhi orang-orang dalam suatu organisasi untuk mengembangkan rencana jangka panjang, dan kepemimpinan operasional adalah proses mempengaruhi orang-orang dalam suatu organisasi untuk menetapkan tujuan jangka pendek.

Shea (1999) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja organisasi. Hal ini didukung oleh pendapat Garry Yulk (1994), yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dapat menyebabkan perekrutan bawahan lebih cepat dan dengan kualitas kerja yang lebih tinggi. Gaya kepemimpinan juga mempengaruhi kinerja jangka pendek bawahan. Demikian pula, Litwin dan Stringer (1985) percaya bahwa gaya kepemimpinan memiliki dampak langsung pada lingkungan kerja organisasi

- Keterampilan

Nadler (1986) dari Sudaresti (2014) menyatakan bahwa keterampilan adalah suatu kegiatan yang memerlukan latihan atau dapat diartikan sebagai implikasi dari kegiatan tersebut. Selain itu, Gordon (1994: 55) menyatakan bahwa ketangkasan adalah kemampuan untuk bekerja dengan mudah dan hati-hati. Menurut Dunnette (1976:33), konsep keterampilan adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan berbagai tugas yang merupakan pengembangan dari hasil latihan dan pengalaman yang diperoleh. Iverson (2001:133) menyatakan bahwa selain pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan, keterampilan juga memerlukan keterampilan dasar untuk melakukan tugas dengan mudah dan akurat.

- Pengalaman berusaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2005: 26), “pengalaman dapat diartikan sebagai mengalami (mengalami, merasakan, terbawa, dsb)”. Elaine B. Johnson (2007: 228) menyatakan: Menurut Hitzman (Muhibbin Syah, 1995: 89), “pengalaman yang dapat mempengaruhi perilaku makhluk hidup dapat dilihat sebagai kesempatan belajar”. Dengan mempelajari hasil dari pengalaman kerja, orang tersebut dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

- b. Aspek Keuangan

- Modal

Menurut Riyanto (2008), struktur modal adalah keseimbangan atau perbandingan utang jangka panjang

dan tingkat modal. Berbeda dengan Brealey, Myers dan Marcus (2008), mendefinisikan struktur modal sebagai pembiayaan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk berinvestasi dan beroperasi.

Munizu (2010) mengemukakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur modal keuangan UMKM:

- a. Ekuitas, penggunaan ekuitas dalam operasi bisnis, dan kemampuan untuk mengelola aset keuangan.
 - b. Kemudahan akses pinjaman dari modal pinjaman, baik perbankan maupun lembaga keuangan non bank.
 - c. Tingkat pengembalian dan tingkat akumulasi modal. Gunakan keuntungan yang ada untuk meningkatkan modal dan mengembangkan unit bisnis.
- c. Teknis produksi
- Tersedianya bahan baku

Persediaan bahan baku merupakan salah satu faktor produksi dan sangat penting untuk kelancaran proses produksi dan produksi produk jadi. Ketersediaan bahan baku yang sesuai sangat tergantung pada jumlah produk yang diproduksi. Oleh karena itu, Anda perlu menyesuaikan prakiraan agar dapat menghitung rencana persediaan bahan baku dengan benar. Kekurangan dan kelebihan bahan baku juga menimbulkan biaya dan mempengaruhi proses produksi, Hendro (2011).

- Kapasitas Produksi
- Layaman dan Nurlatifah (2016), Persediaan adalah suatu barang atau material yang digunakan suatu organisasi

atau perusahaan untuk menjalankan usahanya. Ketika sebuah perusahaan memproduksi suatu produk atau jasa, bahan tersebut digunakan untuk mendukung atau menyediakan kebutuhan produksi.

Definisi inventaris umum lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang disimpan untuk kebutuhan masa depan
- b. Suatu item yang harus ditentukan kapan harus dibutuhkan
- c. Ditentukan sesuai kebutuhan
- d. Suatu item dengan seberapa jauh harus di *maintain*

Item yang merinci berapa lama bahan yang digunakan dalam bisnis perusahaan, seperti produk siap pakai, akan dipertahankan. Untuk itu, persediaan harus diperhatikan dalam setiap industri. Sukanto Reksohadiprodjo (1984). merupakan faktor pasokan bahan baku berikutnya yang harus diperhatikan demi kelangsungan proses produksi

- a. Jika Anda ingin membeli bahan sebagai time order atau dalam stok, di sini Anda perlu menunjukkan jumlah pembelian yang ekonomis sesuai dengan kebutuhan produk.
- b. Upaya menjaga stabilitas produksi
- c. Perubahan harga, dan
- d. . Saat pembelian dilakukan

Kapasitas adalah batas kapasitas unit produksi untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan produk dan biasanya dinyatakan sebagai output. Kapasitas berkaitan dengan kapasitas atau kemauan suatu perusahaan untuk

memenuhi kebutuhan konsumen (Iksan, 2018; Nugraha, 2017). Selain itu, kapasitas berkaitan erat dengan lead time dan jam kerja per produk, sehingga kapasitas diartikan sebagai kapasitas alat mitra untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar dalam waktu satu bulan. (Ayu Lestari & Darsana, 2012).

- Teknologi

Menurut O'Brien (2006), teknologi adalah jaringan komputer yang terdiri dari berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Menurut Aji (2005), informasi adalah data yang diolah dan, menurut sifatnya, data lain yang berguna, yang biasa disebut sebagai informasi. Selanjutnya menurut Sutabri (2014), pengertian teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk memanipulasi data: mengolah, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan cara yang berbeda-beda. Menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi, yaitu terkait informasi akurat, tepat waktu, digunakan untuk keperluan pribadi, digunakan untuk tujuan bisnis, dan digunakan untuk pemerintahan, dan untuk pengambilan keputusan.

Schumpeter (1947) memperkenalkan konsep destruksi kreatif dalam Justica (2012) untuk menjelaskan hal ini. Inti dari konsep ini adalah Keberanian "Menghancurkan" konsep lama harus diganti dengan penciptaan ide dan konsep baru. Secara khusus, ia menangkap peluang untuk produk baru, konsumen, metode produksi.

Transportasi baru, pasar bentuk baru organisasi industri Baru. Peran kunci kelembagaan adalah aturan yang mendorong perusahaan untuk menemukan teknologi baru dan terlibat dalam proses kreatif dan mengganggu yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sistem pendekatan dinamis diharapkan dapat mengubah perilaku suatu organisasi, khususnya di tingkat korporat. Karena perusahaan dapat meningkatkan keuntungan melalui perubahan dan peningkatan teknologi, mereka memiliki kemampuan untuk berinovasi melalui perubahan dan adaptasi teknologi, yang memungkinkan mereka untuk bertahan dalam jangka panjang (Yustika, 2012).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan bisnis meliputi:

- a. Kontrol produksi
 - b. Manajemen pemasaran, dan
 - c. Manajemen keuangan.
 - d. Aspek pasar/pemasaran
- Permintaan pasar

Orientasi pasar merupakan perspektif penting bagi perusahaan yang menempatkan pelanggan mereka di pusat pemahaman keseluruhan dari beberapa kegiatan bisnis (Cravens dan Piercy, 2006). Penerapan orientasi pasar pada perusahaan dapat memberikan dampak yang sangat penting bagi para pelaku usaha UMKM ini untuk memantapkan posisi di pasar yang unggul seperti kinerja pemasaran, pelanggan, karyawan dan inovasi perusahaan. Ketika menerapkan orientasi pasar, fokus

pada berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, akan berhasil. Widha Anggun Sulistya, Augusta Ferdinand, Susilo Toto Raharjo (2015).

Kinerja pemasaran adalah ide (komponen) yang dapat digunakan untuk memperkirakan dampak dari suatu strategi bisnis. Rencana perusahaan selalu ditujukan untuk mencapai kinerja pemasaran dan keuangan (Ferdinand, 2000). Kinerja pemasaran adalah gagasan untuk menilai kinerja pasar suatu produk, dan semua perusahaan tertarik untuk mengetahui kinerja pasar suatu produk dan hasil penjualannya. Keberhasilan kinerja pemasaran dapat diperkirakan dari keberhasilan produk baru, pertumbuhan penjualan, dan laba atau profitabilitas yang dicapai setiap tahunnya. Widha Anggun Sulistya, Augusta Ferdinand, Susilo Toto Raharjo (2015).

- Penetapan Harga

Kotler dan Keller (2012: 410) menyatakan: "Harga perlu mencerminkan nilai yang bersedia dibayar konsumen, tetapi harga hanya perlu mencerminkan biaya pembuatan suatu produk atau penyediaan layanan." Hanya biaya pembuatan produk atau penyediaan layanan. Sebaliknya, harga mencerminkan nilai yang konsumen bersedia membayar. Di sisi lain, menurut Stanton, dikutip Fajar Laksana (2010: 105), "Harga adalah sejumlah uang (dan dalam beberapa kasus beberapa produk) yang diperlukan untuk mendapatkan kombinasi suatu produk dan layanan terkaitnya." Definisi tersebut didefinisikan sebagai berikut: Bukhari Alma (2011: 169) Opini: "Harga

sebagai nilai moneter suatu benda". Harga memainkan dua peran utama dalam proses pengambilan keputusan pembeli. Artinya, peran penugasan dan peran informasi. Menurut Kotler dan Armstrong (2012:52), variabel harga memiliki beberapa elemen aktivitas utamanya, seperti daftar harga, diskon, rabat, dan syarat pembayaran.

- Kegiatan promosi

Promosi oleh Nickels (1996) adalah aliran informasi atau persuasi satu arah yang dirancang untuk memandu individu atau organisasi ke dalam tindakan yang menciptakan pertukaran pemasaran. Cara perusahaan memberikan informasi kepada konsumen merupakan kunci pertukaran. Informasi tentang manfaat produk, informasi tentang nilai tukar yang Anda dapatkan saat menggunakan produk.

Promosi adalah suatu cara komunikasi yang memberikan gambaran yang meyakinkan tentang suatu produk atau jasa kepada calon konsumen (RindangListaSari. Menurut Suharno dan Sutarno (2010), Bauran Promosi adalah kumpulan kegiatan promosi yang dilakukan. Promosi. Bauran Promosi (Pemasaran Campuran) sangat penting perannya. Perusahaan perlu menjalankan program periklanan untuk secara luas di pasar yang menjadi target (Amalina Setiawan et al. 2014)

Strategi promosi merupakan kegiatan yang dirancang untuk membuat konsumen mau membeli produk perusahaan, dan diharapkan tujuan peningkatan penjualan akan tercapai (Lidya Mongi et al. 2013).

e. Kebijakan Pemerintah

Menurut Ratna Purwaningsih, Pajar Damar Kusuma (2015), dalam penelitiannya, indikator untuk mengukur aspek kebijakan pemerintah sebagai faktor eksternal dalam menentukan kinerja UKM adalah permodalan dan kegiatan pembiayaan dan pembinaan, dikatakan sebagai akses. Kantor/SKPD yang berafiliasi, aturan dan regulasi yang ramah bisnis, dan penyiapan lokasi bisnis.

- Akses Permodalan dan pembiayaan

Konsep akses ke sumber kredit tertentu mengikuti konsep Diagne dan Zeller (2001). Diagne dan Zeller (2001) menemukan bahwa jika seorang individu atau rumah tangga dapat meminjam dari sumber kredit tertentu, meskipun mereka memilih untuk tidak meminjam karena berbagai alasan, mereka dapat mengaksesnya dari sumber tersebut.

Adinirekso (2011) Faktor non finansial yang mempengaruhi akses UMK terhadap permodalan adalah adanya relasi atau rekanan pemasok barang antara. Semakin lama hubungan antara UMKM dan pemasok, semakin mudah untuk mengakses bank. Selain itu, Badryah (2009) menyatakan bahwa diperlukan pihak ketiga seperti mitra yang menghubungkan bank dengan pelaku UMK sebagai pemberi kredit.

- Kegiatan Pembinaan

Miftah Thoha (2003), pembinaan adalah proses peningkatan. Melalui pembinaan, menunjukkan bahwa ada kemajuan dan peningkatan dalam kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2012),

menjelaskan bahwa pembinaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu siswa agar melekat pada nilai-nilai yang diterima dan diterapkan secara sosial.

Mulyadi (2009) adalah untuk mengembangkan kemampuan UMKM menjadi perusahaan yang mandiri dan tangguh, memperkuat dan menyeimbangkan perannya dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi Struktur ekonomi nasional yang berkembang dan berkeadilan. Menurut Widjaja (2002), pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang menyangkut usaha-usaha untuk meningkatkan, melengkapi, dan mengembangkan suatu rangkaian pertumbuhan dan menopang pertumbuhan itu Menurut Hafsah (2004), pengembangan UKM, di mana pemerintah dan masyarakat berbagi tanggung jawab, harus:

- a. Kami akan membangun lingkungan bisnis yang menguntungkan dengan mengupayakan perdamaian dan keamanan bisnis serta mendukung prosedur perizinan usaha dan pembebasan pajak.
- b. Dukungan Modal.
- c. Pemerintah memberikan perlindungan korporasi kepada usaha tradisional yang merupakan usaha kelompok ekonomi lemah.
- d. Diperlukan kerjasama yang saling mendukung antara UMKM dengan perusahaan besar.
- e. Meningkatkan pelatihan UMKM dalam bidang pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, manajemen, manajemen dan pengembangan usaha.

- f. Proses kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar membutuhkan media untuk mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM.
- g. Pengembangan kerjasama antara pemerintah dan UKM dengan mempertimbangkan berbagai isu terkini terkait pengembangan bisnis.

- Aturan dan Regulasi

George. J. Stigler dalam Mandala Harefa (2008) menyatakan bahwa “peraturan adalah seperangkat aturan yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat secara umum atau kelompok orang”.

Manfaat peraturan ini dapat dilihat dalam dua hal: pemerintah sebagai badan pengatur dan pengusaha sebagai pemegang izin. Izin diperlukan bagi pemerintah untuk memelihara ketertiban dan kesusilaan umum serta melindungi masyarakat umum. Bagi pengusaha, perizinan harus membawa manfaat sosial dan ekonomi. Tentunya jika kebijakan atau regulasi tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan, Anda perlu mengevaluasi kebijakan tersebut. Hal ini karena peringkat membutuhkan masukan bagaimana kebijakan tersebut menyimpang dari kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, penilaian membantu pembuat kebijakan selama fase penilaian kebijakan dari proses pembuatan kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya memberikan kesimpulan tentang seberapa baik masalah telah diselesaikan, tetapi juga memberikan masukan untuk memperjelas dan mengkritik nilai-nilai yang mendasari

kebijakan, membantu koordinasi, dan mereformasi masalah. Dewi Wuryandani, Hilma Meilani (2013).

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UMKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM di dalam proses pembangunan dalam negeri, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan berpenghasilan yang tinggi, Dewi Wuryandani, Hilma Meilani (2013).

- Lokasi Usaha

Menurut Heizer & Render (2015), lokasi seringkali menjadi faktor biaya dan pendapatan, sehingga lokasi seringkali memiliki kekuatan untuk menentukan strategi bisnis suatu perusahaan. Lokasi strategis bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari lokasi baru perusahaan. Selain itu, menurut Kotler (2008), salah satu rahasia sukses adalah lokasi, yang diawali dengan pemilihan kotamadya. Keputusan ini sangat bergantung pada potensi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, persaingan dan kondisi politik.

f. Aspek Sosial Budaya

Menurut Ratna Purwaningsih, Pajar Damar Kusuma (2015), dalam penelitiannya, indikator untuk mengukur aspek sosial budaya sebagai faktor eksternal dalam menentukan kinerja UKM adalah ketersediaan lapangan kerja, lingkungan bisnis dan investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

- Tersedianya lapangan kerja
Rendahnya angkatan kerja yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan dipengaruhi oleh rendahnya angkatan kerja yang dihasilkan oleh angkatan kerja. Tingkat barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan tergantung pada jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Ke tempat itu. Semakin banyak barang yang diminta konsumen, maka semakin banyak pula barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan, dan oleh karena itu semakin banyak tenaga kerja yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan, Payaman J. Simanjuntak, (2001).
Hubungan antara tingkat upah dan tenaga kerja yang dibutuhkan adalah negatif. Mengikuti kenaikan tingkat upah, jumlah pekerja yang dibutuhkan akan berkurang. Artinya jumlah pengangguran akan bertambah sebanyak. Di sisi lain, jumlah pengangguran menurun karena meningkatnya permintaan tenaga kerja seiring dengan turunnya tingkat upah. Tingkat upah yang lebih tinggi dan kenaikan jumlah pekerja berikutnya hanya terjadi jika perusahaan dapat menaikkan harga jual barang (Payaman J. Simanjuntak, 2001).
- Investasi
Menurut Sunariyah (2003:4): “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akandatang. Selanjutnya Tambunan (2006), mengemukakan iklim usaha yang kondusif adalah iklim usaha yang mendorong seseorang melakukan investasi

dengan biaya dan resiko serendah mungkin, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi. Iklim usaha adalah suatu kumpulan faktor-faktor lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan, dan mengembangkan diri, Ernita Lestari Paidi Hidayat (2013).

- Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang mempunyai pengertian sama dengan perkembangan ekonomi, kemajuan ekonomi, kesejahteraan ekonomi (Jhingan, 2008) adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis, melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu (Budiono, 1982). Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kuantitatif dari perkembangan ekonomi pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu, dan selalu dinyatakan dalam persentase (Sukirno, 2010)

Tingkat kesejahteraan di negara diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses pertumbuhan jangka panjang dalam produksi per kapita (Boediono, 1991: 1). Beberapa ekonom berpendapat bahwa tren produksi per kapita saja tidak cukup. Beberapa persyaratan yang lebih ketat berlaku untuk konsep pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika ada kecenderungan (peningkatan produksi per kapita) karena proses internal perekonomian. Proses pertumbuhan harus dihasilkan sendiri.

Artinya, proses pertumbuhan itu sendiri menciptakan kekuatan atau momentum untuk menghasilkan pertumbuhan lebih lanjut dari waktu ke waktu.

S. Kuznet (1966) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan lebih banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan idealis yang mereka butuhkan. Profesor Bauer menunjukkan bahwa determinan utama pertumbuhan ekonomi adalah bakat, keterampilan, kualitas, kemampuan dan kemampuan, sikap, kebiasaan, nilai, tujuan dan motivasi, serta struktur politik dan kelembagaan (Jhingan, 2013).

g. Aspek peran lembaga

Menurut Ratna Purwaningsih, Pajar Damar Kusuma (2015), dalam penelitiannya, indikator untuk mengukur aspek peran lembaga sebagai faktor eksternal dalam menentukan kinerja UKM adalah dukungan permodalan, bimbingan teknis serta pelatihan, pendampingan dan monev.

- Bantuan permodalan

Modal kerja adalah seluruh modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Atau Anda bisa menganggapnya sebagai Sawir (2003), dana yang harus tersedia untuk mendanai operasi perusahaan sehari-hari. Menurut Riyanto (2013:57), pengertian klasik tentang modal adalah “hasil produksi dan digunakan untuk melanjutkan produksi”. Menurut Dicki Hartanto (2014:85), modal kerja adalah investasi pada aktiva lancar atau investasi pada

aktiva lancar. Modal kerja dapat dibagi menjadi dua kategori: modal kerja total dan modal kerja bersih.

- Bimbingan teknis/pelatihan

Pelatihan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan perubahan keterampilan, pengetahuan, pengalaman, atau sikap, dan pengembangan didefinisikan sebagai persiapan individu untuk memikul tanggung jawab lain atau lebih tinggi yang akan dilakukan. (Simamora, 2001: 345). Selain itu, pelatihan merupakan sarana untuk mengubah persepsi dan sikap, menambah keterampilan, memperluas keterampilan, menilai dan mengetahui kinerja (Robbins, 2001: 187)

- Pendampingan

Mentoring merupakan sarana pemberdayaan yang dianggap ampuh dan efektif dalam membantu individu atau lembaga/organisasi mencapai tujuannya. Mentoring adalah Maya Sartika (2019), sebuah kolaborasi antara dua pihak (pendamping dan klien) berdasarkan rasa saling percaya dan menghormati. Pendampingan bisnis adalah proses membantu masyarakat umum meningkatkan komunitas mereka melalui tindakan kolektif (Twelvetrees, 1991: 1).

- Pemantauan dan Penilaian

Pemantauan adalah proses pemantauan kegiatan implementasi kebijakan, termasuk hubungan antara implementasi dan hasil (Hogwood dan Gunn, 1989). William N. Dunn (1994) menjelaskan bahwa pengawasan memiliki beberapa tujuan:

- a. *Compliance* (kesesuaian/kepatuhan)
Menentukan apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Auditing* (pemeriksaan)
Tentukan apakah sumber daya/layanan dalam kelompok sasaran benar-benar menjangkau mereka.
- c. *Accounting* (Akuntansi)
Menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa yang terjadi dari waktu ke waktu setelah implementasi berbagai kebijakan publik.
- d. *Explanation* (Penjelasan)
Menjelaskan hasil kebijakan publik berbeda dengan tujuan kebijakan publik.

Penilaian Hornby dan Panwell (Mardikanto, 2009) adalah tindakan pengambilan keputusan yang menilai objek, situasi, peristiwa, atau aktivitas tertentu yang diamati. Soumelis (1983) mendefinisikan evaluasi sebagai proses pengambilan keputusan dengan membandingkan pengamatan terhadap objek. Dikembangkan oleh Sutjipta (2009), evaluasi memiliki lima karakteristik:

1. kualitas: Program baik atau tidak baik, kualitas adalah isi program, kegiatan pendidik, media yang digunakan, sikap pelaksana program.
2. kesesuaian (*suitability*): pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat. Program ini tidak menimbulkan kesulitan atau beban bagi masyarakat, tergantung pada tingkat teknis, sosial dan ekonomi masyarakat.

3. Keefektifan: seberapa jauh tujuan akan tercapai.
4. Efisiensi: penggunaan sumber daya yang efektif, dan
5. Kegunaan (*importance*): manfaat bagi mereka yang ikut terlibat dalam program.

C. Manfaat Infrastruktur Perspektif Ekonomi

Beberapa hasil penelitian tentang teori pertumbuhan baru (*new Growth Theory*) mencoba menjelaskan pentingnya infrastruktur dalam mendorong perekonomian. Teori ini memasukkan infrastruktur sebagai input dalam mempengaruhi output agregat dan juga merupakan sumber yang mungkin dalam meningkatkan batas-batas kemajuan teknologi yang didapat dari munculnya eksternalitas pada pembangunan infrastruktur (Hulten dan Schwab, 1991:91).

Infrastruktur mempunyai efek limpahan atau eksternalitas, terutama yang tampak dalam kegiatan produksi. Eksternalitas infrastruktur mempengaruhi kegiatan produksi dengan memberikan aksesibilitas, kemudahan dan kemungkinan kegiatan produksi menjadi lebih produktif. Eksternalitas ini yang disebut dengan eksternalitas positif. Oleh karena itu, masalahnya terlalu disederhanakan dalam hal eksternalitas positif yang ditimbulkan oleh infrastruktur fungsi produksi.

Sektor publik memainkan peran penting dalam kegiatan manufaktur. Padahal, karena peran penting sektor publik sebagai input produksi, sektor publik dapat dimasukkan dalam fungsi produksi. Peran sektor publik yang produktif berpotensi menciptakan hubungan positif antara pemerintah dan pertumbuhan ekonomi (Barro, 1990: 53). Barro (190: 54)

mulai mempelajari literatur tentang pengeluaran publik, termasuk beberapa asumsi untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Negara di sini diasumsikan sebagai pelayanan publik yang ditawarkan tanpa pungutan biaya dan tidak terhalang oleh efek kemacetan.



PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DALAM PERKOTAAN BARRU

A. Karakteristik Wilayah Perkotaan Barru

Wilayah perkotaan Barru terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yakni Kelurahan Sumpang Binangae, Kelurahan Mangempang, Kelurahan Tuwung dan Kelurahan Coppo dengan luas kurang lebih 4.390,85 hektar. Jumlah penduduk di wilayah perkotaan Barru sebanyak 27.588 jiwa, dengan rincian per-kelurahan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Jumlah penduduk perkotaan Barru

No	Wilayah Perkotaan Barru	Jenis Kelamin		Penduduk (jiwa)
		Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	
1	Coppo	3.308	3.138	6.176
2	Mangempang	3.055	3.095	6.150
3	Sumpang Binanage	5.328	5.500	10.828
4	Tuwung	2.145	2.289	4.434
Jumlah		13.836	14.022	27.588

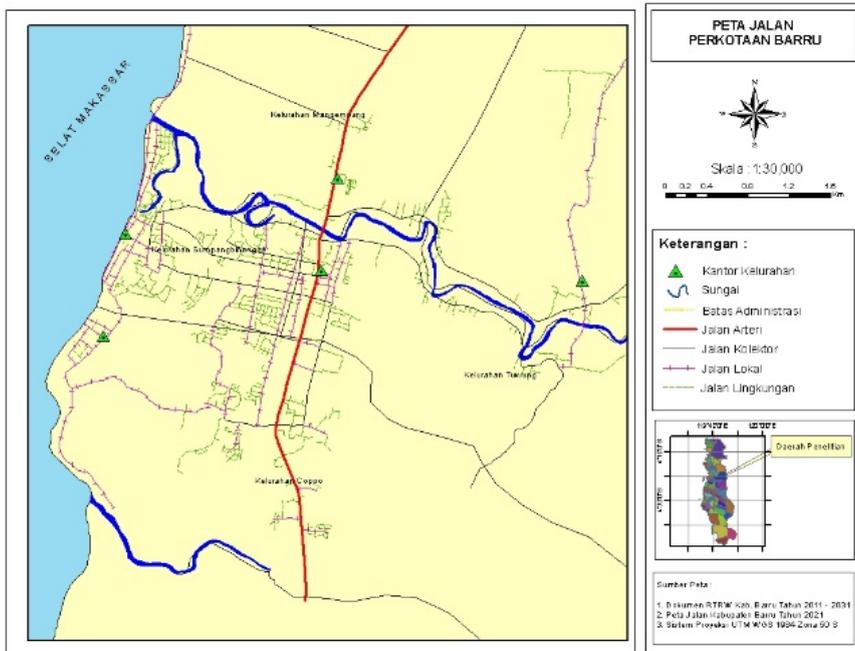
Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Barru Tahun 2020

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan Barru sebesar 1.48 % dengan kepadatan penduduk 221 jiwa/km². Berdasarkan jenis pekerjaan, penduduk di

wilayah perkotaan Barru terdiri dari Pegawai Pemerintahan, wiraswata, nelayan, dan petani.

1. Jaringan Jalan

Infrastruktur jalan di wilayah perkotaan Barru secara umum dalam kondisi mantap dan terkoneksi baik antara jalan arteri, jalan kolektor lokal, dan jalan lingkungan seperti pada gambar peta berikut:



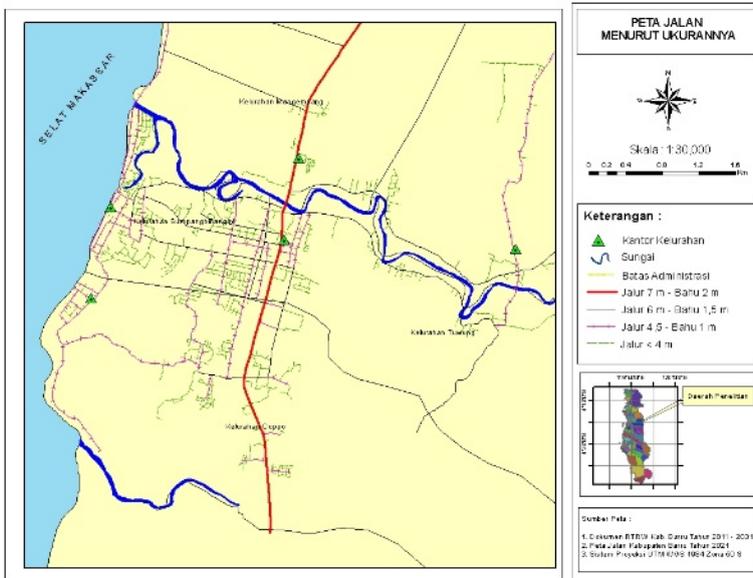
Gambar 4.1. Peta Jalan Perkotaan Barru

Selanjutnya, panjang jalan dalam wilayah perkotaan Barru terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Panjang jalan berdasarkan ruas perkotaan Barru

No	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang (km)
1	1	Barru - Lakonrae	6.40
2	6	Barru - Kamara	3.65
3	7	Jampue - Garongkong	1.70
4	27	Pekkapao - Limpomajang	2.55
5	37	Coppo - Lajari	2.00
6	38	S. Binangae - Garongkong	3.80
7	51	Siawung - Batubessi	5.85
8	63	Siawung - Garongkong	2.40
9	65	Kota Kecamatan Barru	28.50
10	74	Garessi - Kamara	4.35
11	123	Abbatungge - Sepe'e	2.20
12	134	Gempungge - Garongkong	2.00
Total			65.40

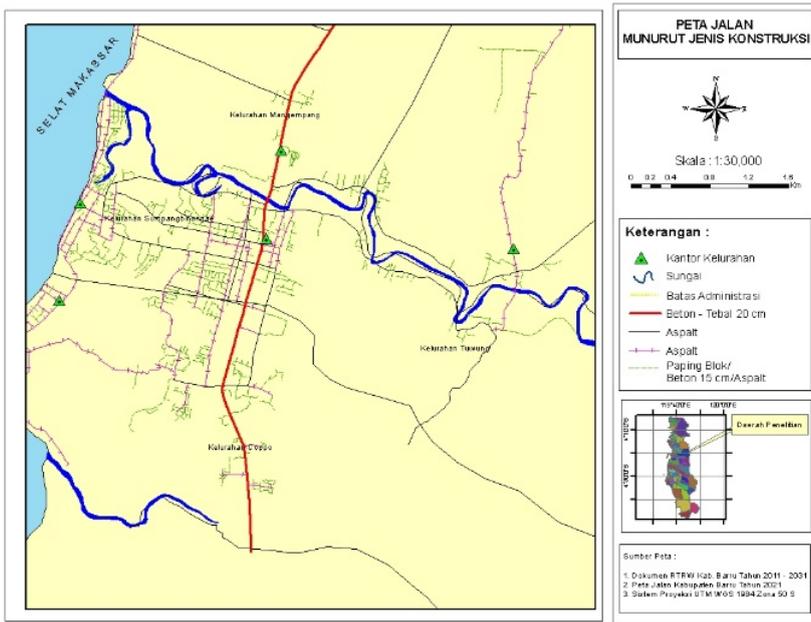
Sumber: Dinas PUPR Kab. Barru Tahun 2009



Gambar 4.2 Peta Jalan Menurut Ukurannya di Perkotaan Barru

Gambar 4.2 memperlihatkan ukuran jalan yang ada di Perkotaan Barru yang terbagi menjadi empat ukuran, jalan arteri yang memanjang dari utara ke selatan lebar jalur 7 m dengan 2 lajur dan bahu 2 m, jalan kolektor yang terhubung langsung dengan jalan arteri lebar jalur 6 m dengan bahu 1,5 m, jalan lokal yang terhubung dari jalan kolektor lebar jalur

4,5 m dengan bahu 1 m, dan jalan lingkungan dengan lebar < 4 m.



Gambar 4.3 Peta Jalan Menurut Jenis Konstruksinya

Gambar 4.3 memperlihatkan konstruksi jalan yang ada di Perkotaan Barru yang terdiri dari 3 jenis konstruksi yakni jalan Beton, Aspalt dan Paving Blok. Untuk jalan arteri menggunakan konstruksi beton, jalan kolektor dan jalan lokal menggunakan konstruksi aspalt, sementara jalan lingkungan umumnya dari paving blok dan sebagian kecil konstruksi beton.

2. Pelayanan Ekonomi

Pelayanan ekonomi dalam wilayah perkotaan Barru meliputi produksi, distribusi dan konsumsi yang terbagi dalam jenis usaha yang dilakukan. Berikut jumlah pelaku pelayanan ekonomi yang terdaftar dan memiliki izin usaha:

Tabel 4.3
Jumlah usaha yang memiliki izin di perkotaan Barru

No	Alamat	Jumlah Usaha yang Memiliki Izin Usaha
1	Kelurahan Coppo	96
2	Kelurahan Mangempang	187
3	Kelurahan Tuwung	220
4	Kelurahan S. Binangae	606
Jumlah		1.109

Sumber: Dinas Perindagkop & UMKM Kab. Barru Tahun 2020

B. Strategi Pengembangan Struktur Pelayanan Ekonomi Perkotaan

1. Perkembangan pelayanan ekonomi di perkotaan Barru

Pelayanan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi pada dasarnya memiliki program kerja seperti peningkatan usaha dengan rencana pembukaan cabang, meningkatkan kualitas kerja karyawan dan lain sebagainya, namun program kerja tersebut tidak dibuat secara tertulis oleh pelaku pelayanan ekonomi perkotaan Barru melainkan hanya dalam bentuk lisan, sehingga dalam realisasinya program kerja tersebut tidak ada target dalam merealisasikannya.

2. Kondisi pelayanan ekonomi perkotaan Barru

Pelayanan ekonomi perkotaan Barru umumnya dapat dikatakan dapat bertahan dan meningkat dari sisi kuantitas dan kualitas, hal tersebut ditandai dengan kemampuan setiap usaha dalam mempertahankan masing-masing usahanya secara turun temurun rata-rata 5 – 20 tahun.

Bertahannya pelayanan ekonomi perkotaan Barru hingga saat ini tentunya dipengaruhi oleh bagaimana strategi

dari masing-masing sektor pelayanan baik produksi, distribusi dan konsumsi, agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi dan budaya. Adapun beberapa strategi secara umum yang digunakan oleh sektor-sektor pelayanan ekonomi perkotaan Barru dalam mempertahankan usahanya dapat diilustrasikan berdasarkan kondisi beberapa usaha yang dijadikan sampel oleh peneliti yang dipengaruhi oleh faktor internal memuat aspek kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), faktor eksternal yang memuat aspek kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi oleh sektor pelayanan perkotaan Barru yang dirangkum dari hasil wawancara sebagai berikut:

A. Faktor Internal

1. Kekuatan (*strengths*)

Kekuatan yang dimiliki disini adalah kekuatan-kekuatan yang secara umum dimiliki oleh layanan ekonomi perkotaan Barru dalam menjalankan usahanya dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki tersebut mempunyai pengaruh terhadap perkembangan layanan ditengah persaingan dan kemajuan dunia bisnis, adapun kekuatan-kekuatan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Lokasi layanan

Lokasi yang strategis adalah salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan suatu layanan, tidak terkecuali dengan pelayanan ekonomi yang ada di perkotaan Barru. Kita ketahui bahwa kota merupakan simpulnya massa (tempat bertemunya orang) sehingga titik-titik keberadaan layanan ekonomi mudah diketahui orang atau konsumen.

- b. Harga yang bersaing
Konsumen pada umumnya lebih menyukai tempat dimana harga yang lebih murah dan tentunya dengan kualitas produk yang bagus.
- c. Sumber daya manusia yang ramah
Karyawan merupakan modal utama dalam suatu bisnis. Karena, seorang karyawan akan berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan para pelanggan atau konsumen, sehingga dalam hal ini banyaknya permintaan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan karyawan dalam memberikan layanan kepada konsumen terkait produk yang ditawarkan oleh pelayanan ekonomi perkotaan Barru. Hal ini merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh umumnya layanan ekonomi untuk menarik konsumen.
- d. Kualitas produk yang dihasilkan/dijual/dipasarkan
Produk yang berkualitas tentunya juga menjadi kekuatan dalam strategi pelayanan ekonomi yang ada di perkotaan Barru, hal ini harus didukung oleh modal yang besar karena produk yang baik dan berkualitas tentu didapatkan dari sumber yang berkualitas juga.
- e. Fleksibilitas layanan
Pelayanan ekonomi perkotaan Baru dalam hal ini mengupayakan pelayanan kepada para pelanggan atau konsumen umumnya bertanggung jawab jika terjadi kesalahan terhadap barang yang dipesan. Dalam hal ini, jikapun kesalahan tersebut disebabkan

dari pihak konsumen, layanan ekonomi tetap berupaya memberikan solusi atas kesalahan tersebut. Demikian pula terkait penetapan harga yang cenderung masih bisa di sesuaikan atau tawar menawar.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan merupakan penghalang yang dihadapi oleh para penyedia layanan ekonomi dalam mengembangkan serta melaksanakan aktivitasnya yang mempengaruhi pencapaian laba yang diinginkan. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

a. Modal yang besar dalam pendirian usaha

Modal yang besar dalam hal ini menjadi salah satu kelemahan bagi layanan ekonomi, terutama yang skala kecil, mengingat modal yang digunakan umumnya adalah milik sendiri dan jika ingin menggunakan jasa perkreditan seperti Bank atau non Bank persyaratannya cukup sulit dan bunganya terlalu besar.

b. Manajemen kurang bekerja optimal

Pelayanan ekonomi perkotaan Barru umumnya telah melakukan pembukuan atau pencatatan, namun dalam kegiatan pencatatan tersebut belum dilakukan secara teratur, karena belum adanya mesin kasir sehingga pencatatan transaksi belum bisa dilakukan secara rapi

c. Kurangnya tempat parkir kendaraan

Mengingat konsumen atau pelanggan umumnya menggunakan kendaraan dalam melakukan transaksi,

namun secara umum pelayanan ekonomi perkotaan tidak menyediakan tempat parkir, sehingga layanan terbatas hanya pada konsumen yang mendapatkan tempat parkir.

d. Produk layanan sejenis

Di perkotaan Barru layanan ekonomi umumnya adalah perdagangan dan jasa, namun tidak sedikit yang jenis layanannya sama, sehingga mempengaruhi tingkat keuntungan dan memicu persaingan yang tidak sehat.

B. Faktor Eksternal

1. Kesempatan (*opportunities*)

Kondisi ini yaitu suatu keadaan yang mendukung atau memberikan kesempatan kepada pelayanan ekonomi perkotaan Barru untuk tumbuh dan berkembang. Adapun Kesempatan ini yaitu sebagai berikut:

a. Akses pemodal dan pembiayaan

Pemerintah melalui BUMN yang ada telah membantu pelayanan ekonomi perkotaan Barru untuk akses pemodal dan pembiayaan, banyak program yang ditawarkan, hanya saja setiap layanan ekonomi masih membutuhkan kebijakan pemerintah dalam hal relaksasi layanan pembiayaan.

b. Perkembangan Teknologi

Salah satu kesempatan dari pelayanan ekonomi perkotaan Barru adalah adanya perkembangan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu dalam proses promosi, pemasaran bahkan sampai

dengan transaksi. Hal ini menjadi kesempatan atau peluang setiap pelayanan ekonomi perkotaan Barru dalam meningkatkan layanan.

- c. Kegiatan pembinaan melalui Dinas/SKPD terkait Kegiatan pembinaan dari Dinas/SKPD hampir disemua sektor layanan dilakukan, hanya saja belum secara kontinu serta pendampingan melalui bantuan-bantuan stimulus.
- d. Peraturan dan regulasi yang pro bisnis Khusus untuk Kabupaten Barru, penyedia layanan ekonomi perkotaan Barru hampir semua belum mengetahui peraturan dan regulasi yang ada terkait bisnis. Hasil identifikasi peneliti terkait regulasi yang ada di Kabupaten Barru yakni, Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Daerah, Perbup No. 57 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPTD Meteorologi Legal, dan Perda No. 1 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan Air Minum, Perda No. 2 tahun 2018, tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Perda No. 6 tahun 2018, tentang penyelenggaraan Tera Ulang.
- e. Pengembangan kota Rencana pemerintah untuk melakukan pengembangan kota seperti kawasan industri, pengembangan pelabuhan dan kereta api yang sementara dikembangkan menjadi kesempatan kepada layanan ekonomi perkotaan untuk lebih maju turut berkembang.

2. Ancaman (*Threats*)

Selain kendala dan hambatan sebagaimana disebutkan di atas, seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian, teknologi, sosial dan budaya pada masyarakat. Layanan ekonomi perkotaan Barru juga harus mengidentifikasi perkembangan tersebut sebagai sebuah ancaman bagi keberlangsungan layanan. Adapun beberapa hal yang dianggap sebagai ancaman

a. Munculnya pesaing baru

Pesaing baru menjadi salah satu ancaman bagi keberlangsungan setiap layanan, apabila jika pesaing tersebut lebih bisa memberikan layanan yang baik seperti kualitas produk dan harga yang terjangkau, tentu hal ini nantinya akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan layanan apalagi dengan maraknya layanan online yang begitu mudah tumbuh dan berkembang.

b. Stabilitas harga

Kondisi ekonomi dapat mengakibatkan setiap harga barang dan bahan menjadi tidak stabil. Tentu kondisi ini nantinya juga dapat memberikan ancaman bagi layanan ekonomi yang ada di perkotaan Barru.

c. Pandemi Covid 19

Dengan wabah pandemic covid 19 hampir semua layanan ekonomi mengalami penurunan omset, hal ini dikhawatirkan dapat berlanjut beberapa tahun kedepan tanpa ada solusi konkrit dari pemerintah.

c. Implementasi analisis SWOT pada pelayanan ekonomi perkotaan Barru

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku pelayanan ekonomi perkotaan Barru di atas, berikut tabel yang digunakan untuk menganalisis dan menentukan keputusan strategis dengan menggunakan pendekatan matriks SWOT.

Matriks SWOT dihasilkan empat alternatif strategis yang dapat diambil oleh pelayanan ekonomi perkotaan Barru dalam mengembangkan layanan, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi *Streght-Opportunities* (SO)

Kondisi ini biasanya menjadi kondisi yang diharapkan oleh sebuah layanan ekonomi, karena kelebihan atau kekuatan yang dimiliki dipakai untuk memanfaatkan segala kesempatan yang ada, sehingga layanan dapat memiliki keunggulan. Adapun beberapa kekuatan dalam memanfaatkan kesempatan yang ada:

- a. Lokasi layanan harus disesuaikan dengan arahan pemerintah dengan melihat pengembangan kota
- b. pemanfaatan teknologi dalam layanan
- c. Memanfaatkan kegiatan pembinaan untuk peningkatan SDM pada layanannya
- d. Meningkatkan dan menambah jenis produk yang berkualitas dengan memanfaatkan akses pemodalan

2. Strategi *Weaknesses Oportunities* (WO)

Strategi ini ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalisir kelemahan yang ada.

- a. Memanfaatkan akses permodalan untuk pendirian layanan
- b. Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk manajemen layanan
- c. Memperhitungkan tempat parkir kendaraan dalam penyiapan lokasi usaha
- d. Mendirikan layanan dengan memperhitungkan jenis layanan sekitar.

3. Strategi *Strengths Threat* (ST)

Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman yang ada. Adapun beberapa kekuatan tersebut, yakni sebagai berikut:

- a. Mengembangkan daya saing dari aspek harga dan pelayanan
- b. Menjaga kualitas layanan meskipun harga tidak stabil di pasaran
- c. Memanfaatkan fleksibilitas layanan menghadapi pandemic covid19

4. Strategi *Weaknesses Threats* (WT)

Strategi ini berusaha meminimalisir kelemahan yang ada, serta menghindari ancaman. dalam kondisi ini perusahaan dituntut untuk segera berbenah diri, karena hanya dengan cara itulah

sebuah perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

- a. Mempertahankan kualitas layanan
- b. Meningkatkan fungsi manajemen menghadapi pandemic covid19
- c. Menyiapkan layanan parkir konsumen
- d. Menjalin hubungan baik dengan konsumen
- e. Memberikan penawaran khusus kepada konsumen

C. Pola dan Pemanfaatan Ruang Perkotaan Barru

Dalam dokumen rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Barru, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dimana kawasan perkotaan Barru ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah yang berfungsi melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kabupaten/kota.

Strategi Kabupaten Barru dalam penataan ruang wilayah perkotaan mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya. Lebih khusus lagi untuk ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan, jasa dan pelayanan umum, salah satunya adalah penyediaan prasarana dan sarana yang meliputi

fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan umum, prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal serta lokasi dan jalur evakuasi bencana dan tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan, jasa dan pelayanan umum.

Dari uraian tersebut diatas pengembangan jaringan jalan di perkotaan Barru diarahkan sebagai pendukung kegiatan ekonomi, dimana jaringan jalan yang terdiri dari bentuk jalan, fungsi jalan, ukuran jalan serta konstruksi jalan diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan wilayah perkotaan dan sekitarnya, namun berdasarkan hasil analisis, secara spasial, aktifitas layanan ekonomi di wilayah perkotaan Barru memberikan pengaruh terhadap pola keruangan perkotaan Barru, karena semakin meningkat fungsi jalan maka peluang peningkatan layanan ekonomi perkotaan Barru kecil, demikian juga dengan bentuk jalan, hal ini berpotensi mempengaruhi perkembangan kota dari sisi pola pergerakan, seperti yang diutarakan Sujarko (1989), pola pergerakan merupakan efek yang diakibatkan oleh faktor kegiatan manusia, sehingga dalam penanganan secara spasial perlu dilakukan perencanaan ruang yang lebih komprehensif dengan penerapan etika keruangan seperti penyesuaian antara jenis layanan ekonomi dengan kondisi infrastruktur jaringan jalan baik dari bentuk, ukuran, konstruksi dan fungsi jalan itu sendiri.



5 PENUTUP

Variabel ukuran jalan dan konstruksi jalan berperan secara signifikan sebagai faktor determinan pembentukan struktur pelayanan ekonomi perkotaan Barru, terhadap variabel bentuk jalan dan fungsi jalan, pembentukan struktur pelayanan ekonomi tidak berpengaruh signifikan yang artinya bentuk jalan dan fungsi jalan sebagai penghubung kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua dan seterusnya tidak membuat struktur pelayanan membaik.

Strategi pengembangan struktur pelayanan ekonomi perkotaan kota Barru didapatkan melalui analisis SWOT, dengan melihat Strength-Opportunities (SO) atau kekuatan dan kesempatan, Weaknesses Opportunities (WO) atau kelemahan dan peluang, Strengths Threat (ST) atau kekuatan dan ancaman serta Weaknesses Threats (WT) atau kelemahan dan ancaman.

Dalam mendirikan jenis pelayanan perkotaan di Kota Barru, sebaiknya memperhatikan jaringan jalan baik dari bentuk jalan, fungsi jalan, ukuran jalan dan konstruksi jalan. Dalam pengembangan struktur pelayanan ekonomi perkotaan kota Barru sebaiknya memperhatikan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan serta memperhitungkan jumlah pelayanan yang akan

dikembangkan dengan jumlah seluruh pelayanan yang ada di wilayah perkotaan Barru.



DAFTAR PUSTAKA

- Ayudhita R. S. (2018), *Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode tahun 2005 – 2014*, Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Azuwandri, Retno Agustina Ekaputri, Sunoto., (2019), *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu.
- Desti S., (2018), *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Bantaran Sungai Ngrowo Di Desa Panggungrejo, Kutoanyar, Dan Tretek Kabupaten Tulungagung*, Ekonomi-Akuntansi, Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Dian A., (2014), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Di Kabupaten Nagan Raya*, Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia Volume 1, Nomor 1, Mei 2014, Universitas Teuku Umar.
- Didi S., Zainuddin S., dan Ulfa M. (2016), *Analisis Fungsi Pelayanan Kecamatan-Kecamatan Di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan*, Jurnal Ekonomi (JE) Vol.1(1), April 2016, E-ISSN: 2503-1937, Page: 44-55, Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo, Universitas Halu Oleo

Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Barru tahun 2016 – 2021, Bappeda Kabupa ten Barru Tahun 2018

Ernita L., Paidi H., (2012), *Analisis Persepsi Pengusaha Terhadap Iklim Usaha Di Kota Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.3.*

Harry Kurniadi Atmaja, Kasyful Mahalli, S.E., M.Si. *Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sibolga, Jurnal Ekonomi Volume 3 Nomor 4*

I Ketut Sumadiasa, Ni Made Tisnawati, I G.A.P. Wirathi., (2016), *Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik dan PMA terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Tahun 1993 – 2014, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 5 No. 7 Juli 2016, Bali*

Layaman, Nurlatifah, (2016), *Strategi Meningkatkan Produksi UMKM di Kabupaten Cirebon Melalui Efektivitas Persediaan Bahan Baku dan Modal Usaha, Jurnal AL-Mustashfa Vol.4 No.2 Tahun 2016, Fakultas Syari‘ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*

Lesta Karolina B Sembanyang., (2011), *Analisis Keterkaitan ketersediaan Infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, JEJAK, volume 4 Nomor 1, Maret 2011, Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.*

Mega Lestari, Suhadak., (2019), *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Ekonomi Indonesia, Jurnal Adminsitrasi Bisnis (JAB) Vol.70 No.1 Mei 2019 Universitas Brawijaya, Malang.*

Mela A. P., Rosmayani, Rosmit, (2018), *Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Saluran Distribusi Usaha Kecil*

Menengah (UKM), Jurnal Valuta Vol. 4 No 2, Oktober 2018, Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Mohammad A. (2017), *Pengaruh Pendampingan Usaha Terhadap Kinerja UMKM*, Vol.4. No.1 April 2017 page 915-919, Fakultas Komunikasi Bisnis, Universitas Telkom.

Onisda R. D. Z., Agung W., Annisaa H.I., *Penentuan Skala Pelayanan Pada Kawasan Perdagangan Bagian Kota Malang Barat*, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang (ITN).

Rr. Lulus P.N., Edy S., Dian T., (2015), *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kota Semarang*, Volume 17 Nomor 2, Juni 2015: 82 – 103.

Rindang B. P., Muhammad F. (2009), *Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 2(2):222-236, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Rita Diana, (2019), *Analisis Aksesibilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil Pada Lembaga Keuangan Formal Di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 27, No. 1, 2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Padang.

Rindang Bangun Prasetyo, Muhammad Firdaus., (2009), *Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia*, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.

Rifki Alfian Syafi'I, Eko Budi Santoso., (2015), *Identifikasi Kemampuan Pelayanan Ekonomi dan Aksesibilitas Pusat Kegiatan Lokal Ngasem di Kabupaten Kediri*, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh

Tatan Sukwika., (2018), *Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia*, Jurnal Wilayah dan Lingkungan Volume 6 Nomor 2, Agustus 2018, universitas Sahid Jakarta, Jakarta, Indonesia.